BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan adanya akselerasi dalam berbagai aspek pembangunan, pemerintah dituntut secara optimal untuk dapat berperan serta berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang seutuhnya. Oleh karenanya pemerintah harus mampu dalam membentuk suatu organisasi publik yang secara utuh dan optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan dari bidangnya. Setiap unit organisasi yang dibetuk oleh pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah harus mampu melaksanakan tugas kepelayanan sesuai dengan tujuan, sasaran serta fungsi dari organisasi yang dibentuk tersebut.

Salah satu organisasi yang adalah dan berfungsi dalam pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang fokus pada pelayanan penyediaan fasilitas publik secara fisik. Selain itu dinas ini bertugas lebih pada penyediaan fasilitas publik secara umum juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dengan harapan agar supaya pemerintah secara optimal memberikan ketersediaan fasilitas umum kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan pelayanan kepada masyarakat dalam aspek fisik.

Sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dilingkungan pemerintah daeran Bone Bolango, salah satu unit kerja yang terbentuk adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain telah dibentuk secara organisasional, pemerintah daerah juga telah memberikan uraian tugas ataupun tugas pokok serta fungs dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone Bolango tersebut. Sebagai unti yang bertanggungjawab pada aspek penyediaan saranan dan prasaran umum, maka Dinas PUPR memiliki tugas pokok yaitu sebagai pembantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain memiliki tugas, Dinas PUPR juga berfungsi dalam:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

c. Pembinaan, pengembangan serta Pengawasan di bidang Pekerjaan Umum; dan
d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya.

Salah satu kegiatan ataupun fungsi dalam ilmu manajemen adalah pengawasan. Tujuan dari adanya pengawasan adalah untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan tujuan, standar dan sasaran dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Olehnya, pengawasan menjadi hal yang penting dalam sebuah kegiatan organisasi. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka akan dapat menekan tingkat kesalahan dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan cara melakukan koreksi secara dini ataupun minimalisir atas kesalahan yang dilakukan dalam sebuah organisasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango, menyangkut dengan kegiatan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan para pegawai yang dilakukan oleh pimpinan, didapat bahwa pelaksanaan pengawasan yang kurang, dimana dapat dilihat dari beberapa hal terkait dengan pengawasan diantaranya: (1) penanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan tidak secara langsung melakukannya, sehingga yang terjadi di lapangan adalah bahwa para ASN yang harusnya melakukan tanggungjawabnya, digantikan oleh pegawai honorer. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN dimana ASN tersebut bertanggungjawab atas pekerjaannya tetapi pekerjaan itu lebih banyak dikerjakan oleh tenaga honorer, selanjutnya (2) pelaksanaan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai lebih banyak dilakukan pada akhir pelaksanaan pekerjaan. Hal ini terkait dengan kontrol yang dilakukan oleh pimpinan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, dimana kontrol yang dilakukan hanya pada saat pekerjaan selesai dilakukan yang seharusnya dilakukan sejak awal pekerjaan tersebut dikerjakan hingga selesainya pekerjaan tersebut dikerjakan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Pelaksanaan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan maka dapat diidentifikasikan masalah pada penelitian ini adalah:

1) Adanya pelimpahan tanggungjawab oleh ASN ke honorer
2) Pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan pada akhir pekerjaan

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka fokus masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan tersusun sebuah hasil penelitian yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Secara Teori

Sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi dalam menentukan kebijakan dibidang sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

2) Manfaat Secara Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya yang ada hubunganya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.